



IPB University
— Bogor Indonesia —

PENDAHULUAN **(Teori & Kebijakan Pembangunan** **Perdesaan)**

oleh

Bambang Juanda

Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

<https://bambangjuanda.com/>

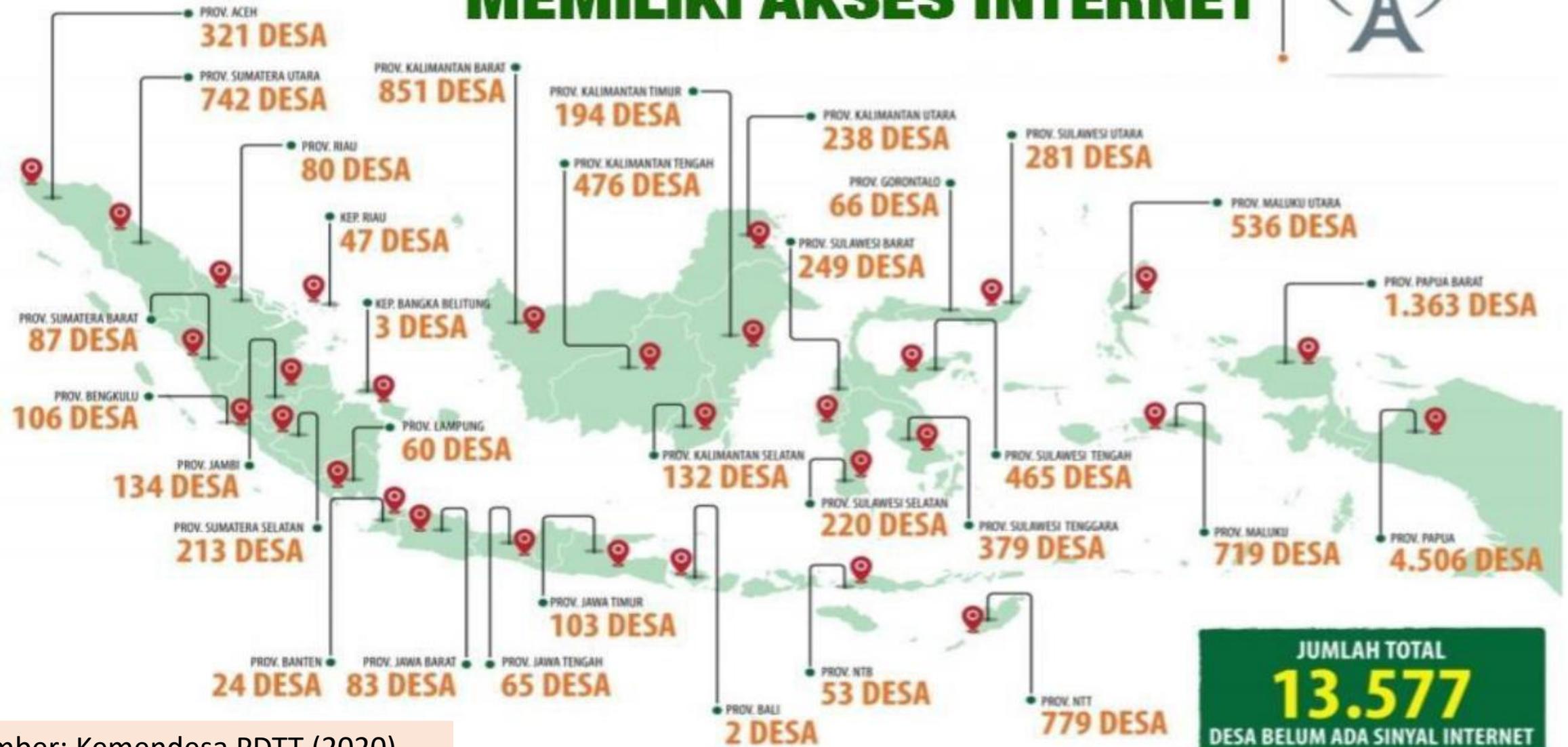
New Normal or Back to Normal?

- Sebelum Pandemi Covid-19: Industri 4.0 utk **Keunggulan & Daya Saing**. **HipeRealita** (Baudrillard, 1981) misalnya Harga Kopi di Starbuck 40rb
- Ketika Pandemi (PSBB): Otomasi Ind-4.0 bantu **interaksi antar manusia** Perilaku **sesuai kebutuhan**; tidak terkait dgn *Image, Luxury, Prestise*.
- Banyak pekerja yg terkait “bisnis” ini terancam keberlanjutannya.
- Terapi psikis (efek kejut) untuk introspeksi betapa rapuhnya kehidupan sosial selama ini, ketika sebuah “batu” (Covid-19) menyimpannya.
- Fokus mengefisienkan pada yang dibutuhkan saja. Change or we die!

Pergeseran Lainnya dalam New Normal

- Perusahaan mendapatkan pasokan dari pasar domestik utk kontinuitas pasokan → Peluang sektor Pertanian (Perdesaan), UKM
- Perilaku masyarakat lebih antisipatif terhadap kejadian “krisis” serupa, misalnya perilaku menabung dan kesadaran akan isu kesehatan
- Baru sadar/melaksanakan protocol Covid-19, PSBB direlaksasi?
- Pergeseran ke ekonomi digital (adopsi TIK): e-commerce, tele-edukasi, otomatisasi. → kesiapan Wilayah atau Perdesaan?
- Harga Produk Pertanian? Konektivitas Supply-Demand?
- **Rekomendasi Penguatan Infrastruktur Dasar TIK: Telekomunikasi, Internet, Konten**
- **→ Kebijakan Fiskal Inklusif & Berkelanjutan di Wilayah & Perdesaan?**

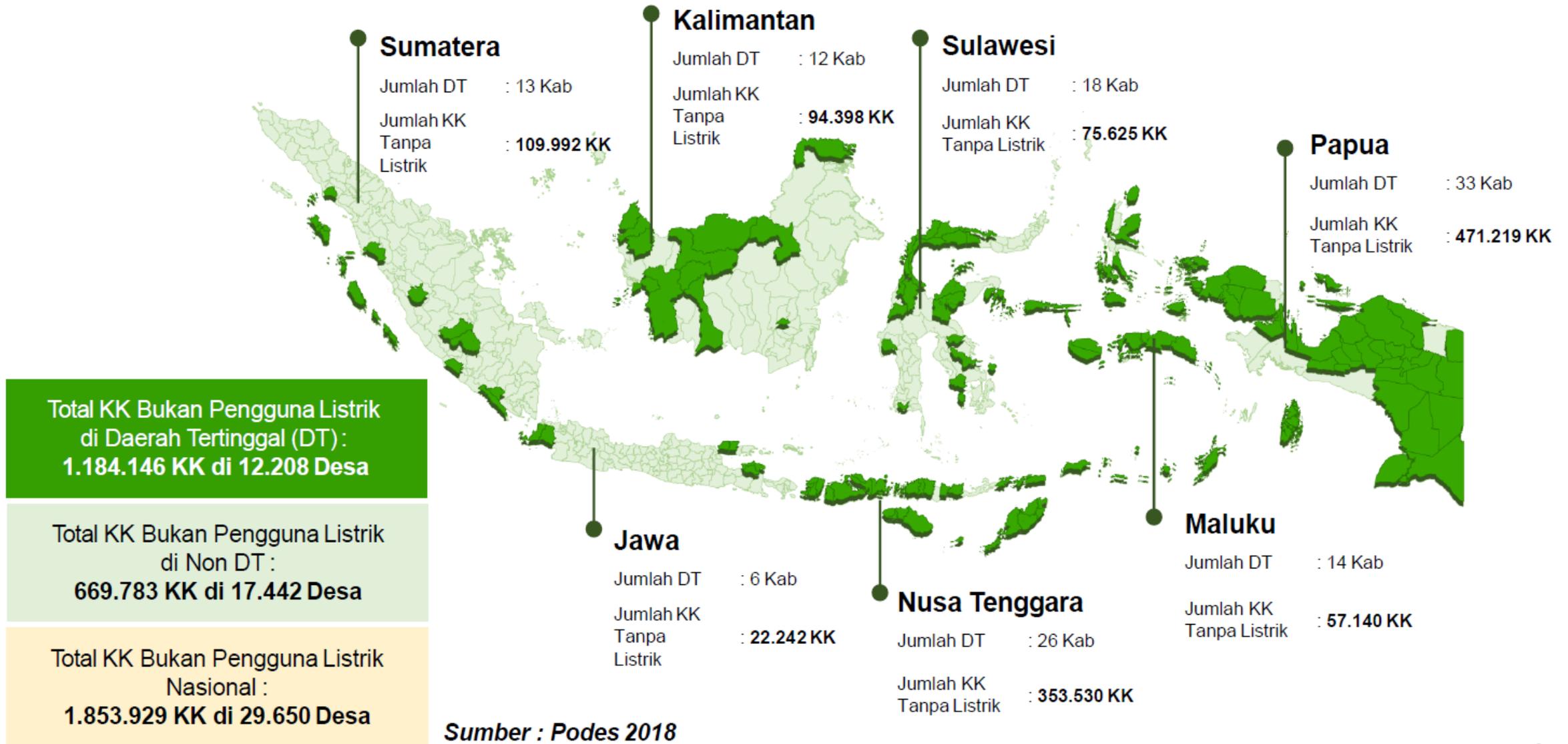
DESA-DESA YANG BELUM MEMILIKI AKSES INTERNET

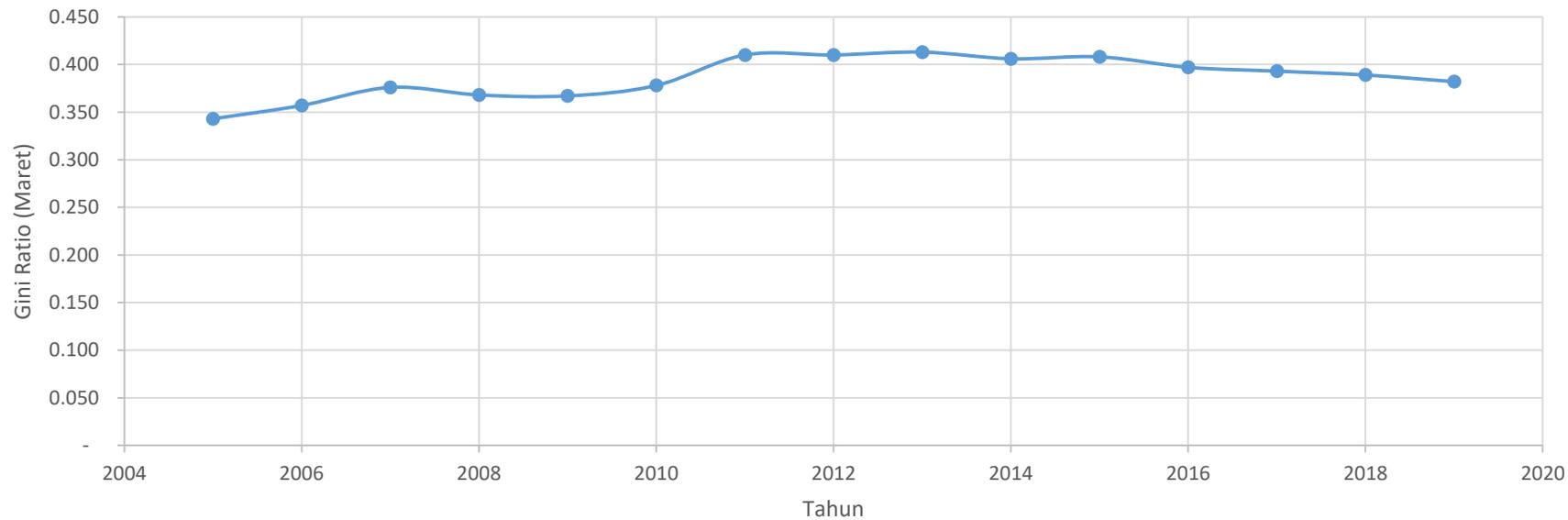
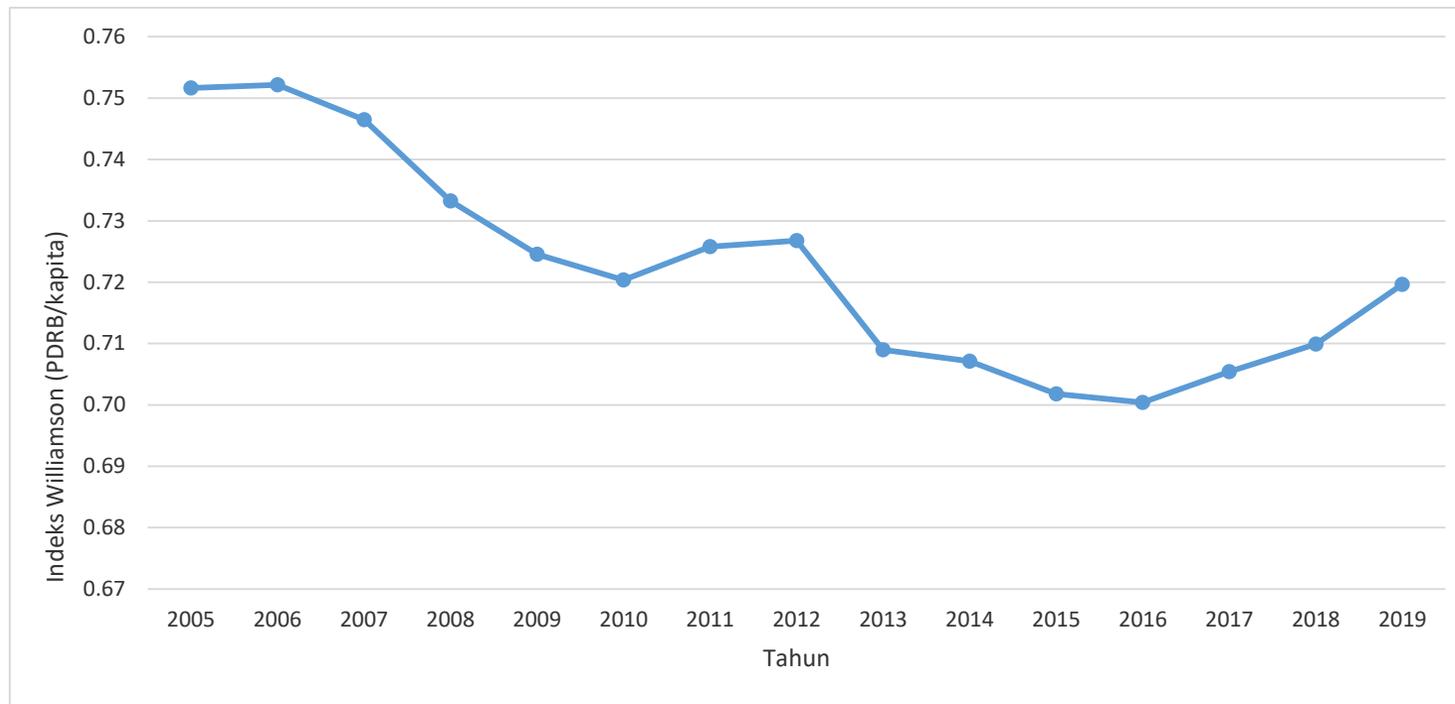


JUMLAH TOTAL
13.577
DESA BELUM ADA SINYAL INTERNET

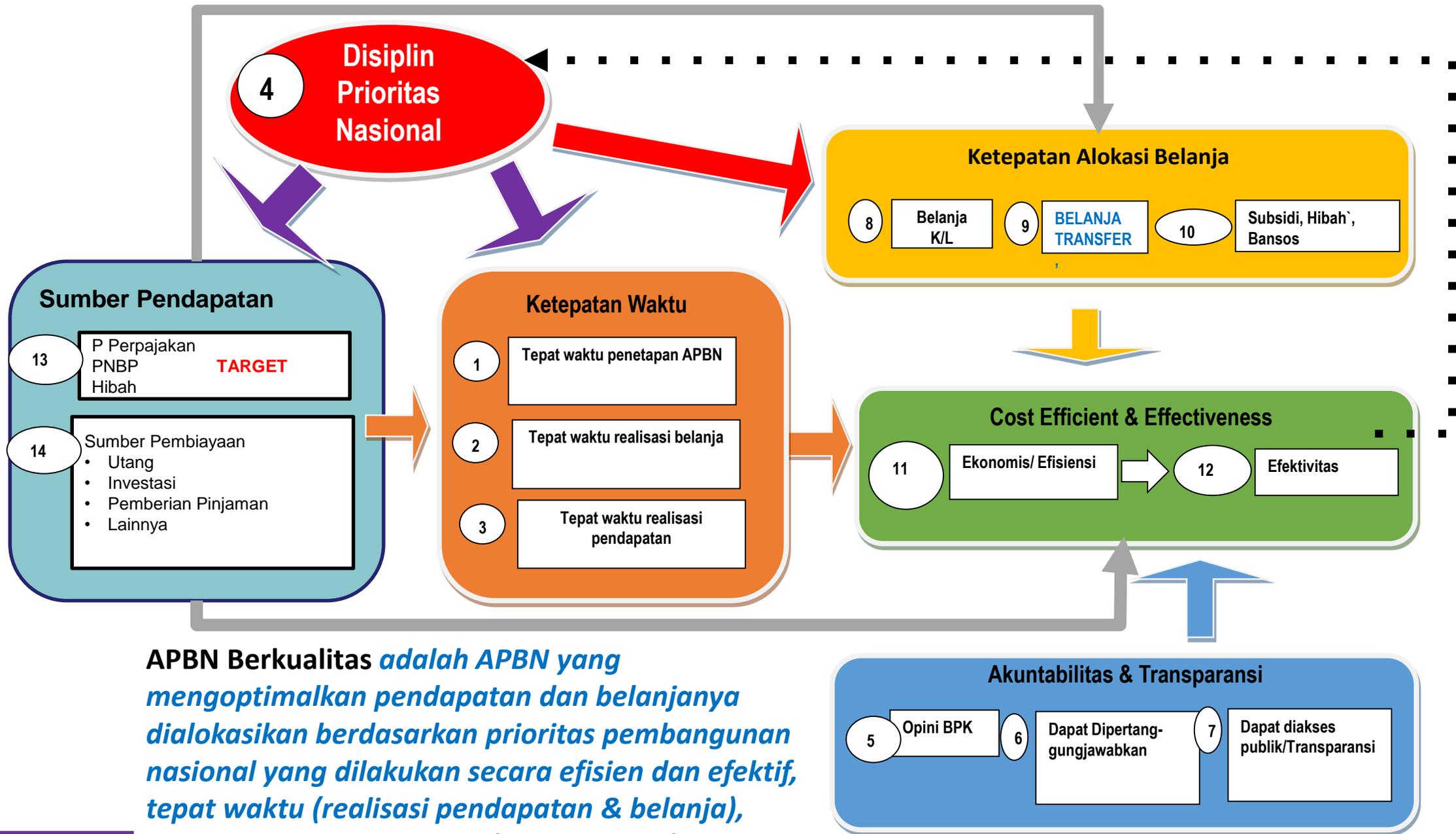
Sumber: Kemendesa PDTT (2020)

Kebutuhan Pembangunan Listrik di Daerah Tertinggal





APBN BERKUALITAS?



APBN Berkualitas *adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja), transparan dan akuntabel* (Juanda, 2019)

APBN
(triliun rupiah)

2019

2020

	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165,1	349,0	16,1	4,6	2.233,2	375,9	16,8	7,7
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164,7	348,9	16,1	4,6	2.232,7	375,9	16,8	7,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,4	278,7	15,6	6,2	1.865,7	279,9	15,0	0,4
a. Pendapatan DJP (<i>Include Pph Migas</i>)	1.577,6	247,7	15,7	1,3	1.642,6	241,6	14,7	(2,5)
b. Pendapatan DJBC	208,8	31,0	14,8	73,1	223,1	38,3	17,2	23,6
2. PNBPN	378,3	70,2	18,5	(1,2)	367,0	96,0	26,2	36,8
II. Penerimaan Hibah	0,4	0,1	33,7	(43,7)	0,5	0,1	15,5	(47,4)
B. Belanja Negara	2.461,1	452,1	18,4	7,7	2.540,4	452,4	17,8	0,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,3	260,7	16,0	11,4	1.683,5	277,9	16,5	6,6
1. Belanja K/L	855,4	128,8	15,1	24,8	909,6	143,0	15,7	11,0
2. Belanja Non K/L	778,9	132,0	16,9	0,9	773,9	134,9	17,4	2,2
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826,8	191,3	23,1	3,1	856,9	174,5	20,4	(8,8)
1. Transfer Ke Daerah	756,8	181,2	23,9	3,4	784,9	167,3	21,3	(7,7)
2. Dana Desa	70,0	10,1	14,4	(1,9)	72,0	7,2	10,0	(28,6)
C. Keseimbangan Primer =A-(B-bayar bunga)	(20,1)	(32,5)	161,5	87,1	(12,0)	(2,6)	21,6	(92,0)
D. Defisit	(296,0)	(103,1)	34,8	20,1	(307,2)	(76,4)	24,9	(25,8)
% Defisit thd PDB	(1,84)	(0,65)			(1,76)	(0,45)		
E. Pembiayaan Anggaran	296,0	177,9	60,1	16,9	307,2	74,2	24,2	(58,3)

Pasal 46 UU APBN 2020

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2020 mengupayakan pemenuhan **sasaran pembangunan yang berkualitas**, yaitu dalam bentuk:

- a) **penurunan kemiskinan** menjadi sebesar 8,5% - 9,0%;
- b) **tingkat pengangguran** terbuka menjadi sebesar 4,8% - 5,0%;
- c) **penurunan Gini Ratio** menjadi sebesar 0,375 - 0,380; dan
- d) peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia** mencapai 72,51

Kebijakan utk pencegahan dan penanganan dampak Covid-19?

COVID-19

2.540,4 (trilyun Rp)

1/3 utk Dana Instansi Vertikal & TP

APBN 2020

856,9 (trilyun Rp)

1/3 untuk Dana Transfer Ke Daerah & dana Desa (APBD, APBDes)

**Era OTDA:
Perekonomian nasional
sangat tergantung
Perekonomian daerah**

REALISASI APBN S.D. 31 MEI 2020

Pendapatan Negara dan belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan Defisit mengalami peningkatan secara nominal maupun rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 3 tahun terakhir

35% ke APBD

29% ke APBD

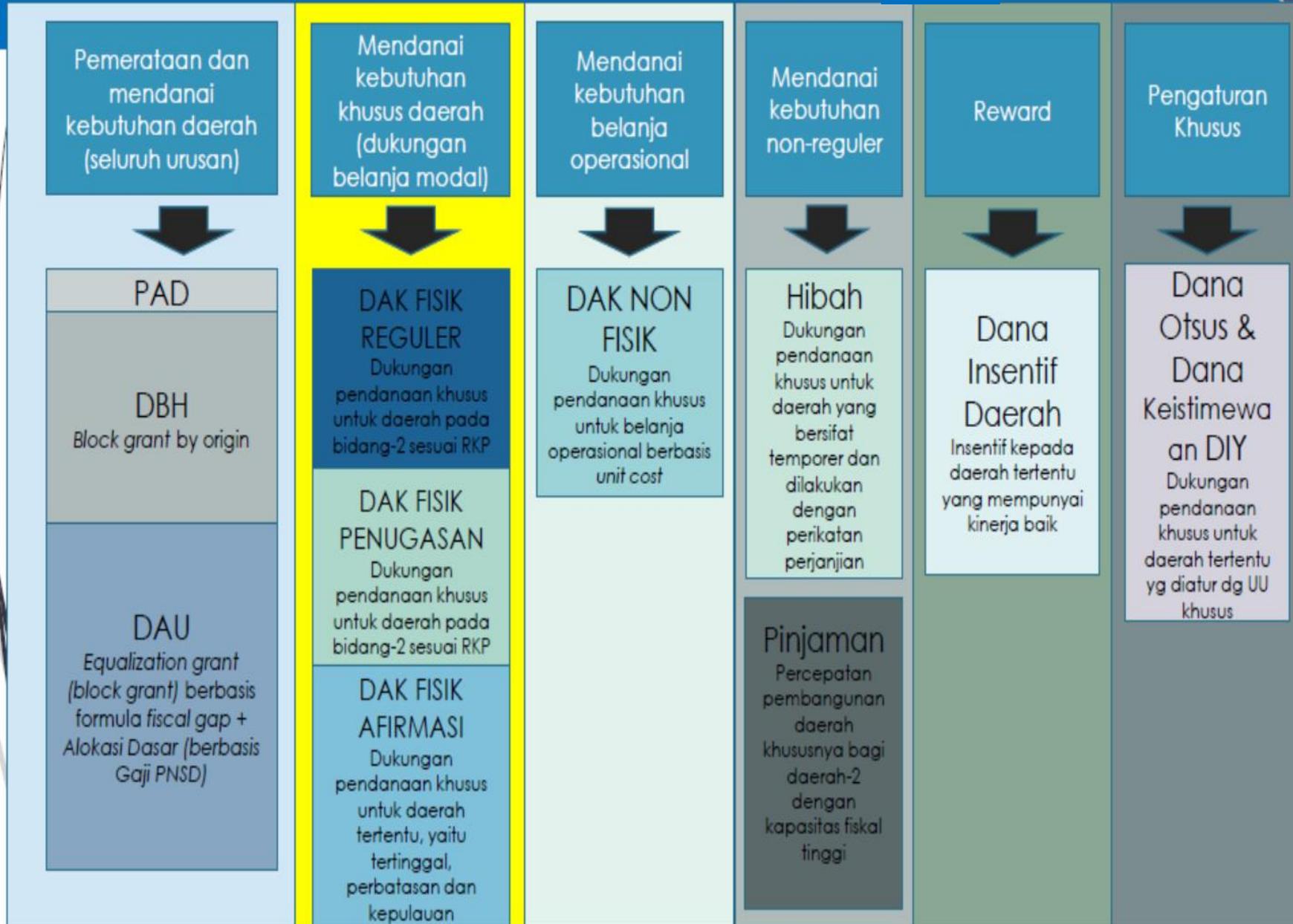
Uraian (triliun rupiah)	2018			2019				2020			
	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd LKPP	Growth (%)	LKPP Unaudited	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd LKPP Unaudited	Growth (%)	Perubahan APBN (Perpres 54/2020)	Realisasi s.d. 31 Mei	% thd Perubahan APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	686,0	35,3	15,5	1.958,6	730,1	37,3	6,4	1.760,9	654,3	37,7	(9,0)
I. Pendapatan Dalam Negeri	684,5	35,5	15,3	1.953,3	729,7	37,4	6,6	1.760,4	663,1	37,7	(9,1)
1. Penerimaan Perpajakan	538,7	35,5	14,5	1.546,1	571,2	36,9	6,0	1.462,6	526,2	36,0	(7,9)
<i>Tax Ratio % (arti luas)</i>	3,98			10,69	4,00			9,14	3,50		
a. Pendapatan DJP (Include Pph Migas)	484,9	36,9	14,2	1.332,7	498,5	37,4	2,8	1.254,1	444,6	35,4	(10,8)
b. Pendapatan DJBC	53,8	26,2	17,4	213,5	72,7	34,0	35,1	208,5	81,7	39,2	12,4
2. PNBPN	145,9	35,6	18,1	407,1	158,5	38,9	8,6	297,8	136,9	46,0	(13,6)
II. Penerimaan Hibah	1,4	9,3	580,5	5,4	0,5	9,2	(66,0)	0,5	1,2	240,2	143,7
B. Belanja Negara	779,5	35,2	7,9	2.304,3	855,9	37,1	9,8	2.613,8	843,9	32,3	(1,4)
I. Belanja Pemerintah Pusat	458,0	31,5	18,0	1.493,2	530,8	35,6	15,9	1.851,1	537,3	29,0	1,2
1. Belanja K/L	231,5	27,3	19,9	870,3	288,2	33,1	24,5	836,5	270,4	32,3	(6,2)
2. Belanja Non K/L	226,5	37,2	16,2	622,9	242,6	38,9	7,1	1.014,6	267,0	26,3	10,1
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	321,5	42,4	(4,0)	811,1	325,1	40,1	1,1	762,7	306,6	40,2	(5,7)
1. Transfer Ke Daerah	300,8	43,1	(1,9)	741,3	304,7	41,1	1,3	691,5	277,7	40,2	(8,8)
2. Dana Desa	20,7	34,5	(26,7)	69,8	20,4	29,3	(1,1)	71,2	28,9	40,6	41,3
C. Keseimbangan Primer	19,0	(164,9)	(163,5)	(70,1)	1,3	(1,9)	(93,1)	(517,8)	(33,9)	6,6	(2.710,4)
D. Defisit	(93,5)	34,7	(27,3)	(345,6)	(125,8)	36,4	34,5	(852,9)	(179,6)	21,1	42,8
<i>% Defisit thd PDB</i>	(0,63)			(2,18)	(0,79)			(5,07)	(1,10)		
E. Pembiayaan Anggaran	179,4	58,7	(8,3)	398,9	159,9	40,1	(10,9)	852,9	356,1	41,7	122,6
SiLPA/SiKPA	85,9			-	34,1			-	176,4		

PBU,
Subsidi,
Bansos,
lainnya





SKEMA PENDANAAN DAERAH (UU 33/2004 dan Implementasinya s.d. 2020)



Klasifikasi Urusan Pemerintahan UU RI NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- ABSOLUT**
1. Politik Luar Negeri
 2. Pertahanan
 3. Keamanan
 4. Moneter dan fiskal
 5. Yustisi
 6. Agama

KONGKUREN

PEMERINTAHAN UMUM

WAJIB

PILIHAN

**PP 2/2018
SPM**

NON Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan

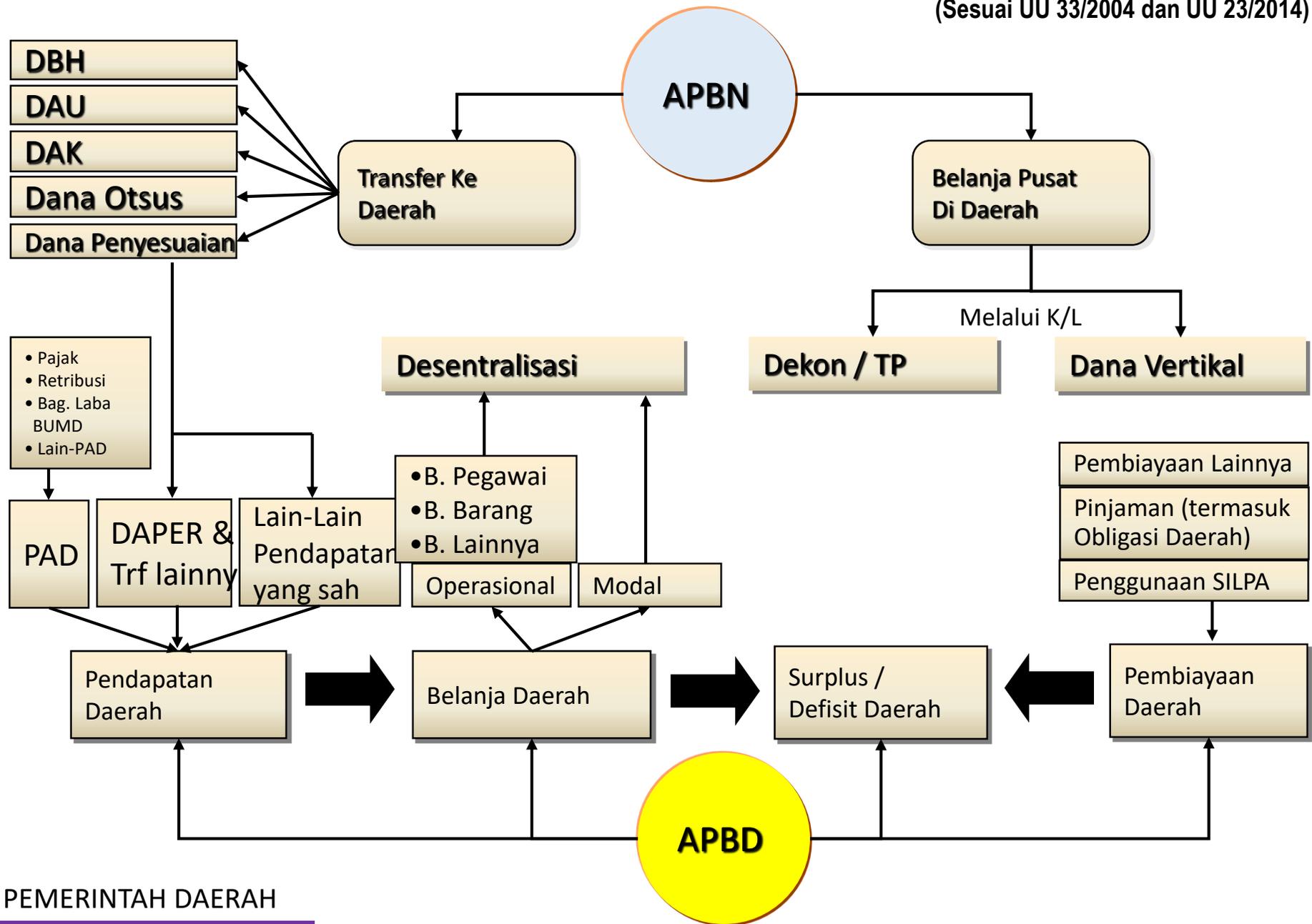
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. **Kesehatan**
3. Pekerjaan UMUM dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumberdaya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Tranmigrasi

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, minimal sesuai SPM yg ditetapkan Pusat.

18. Kearsipan

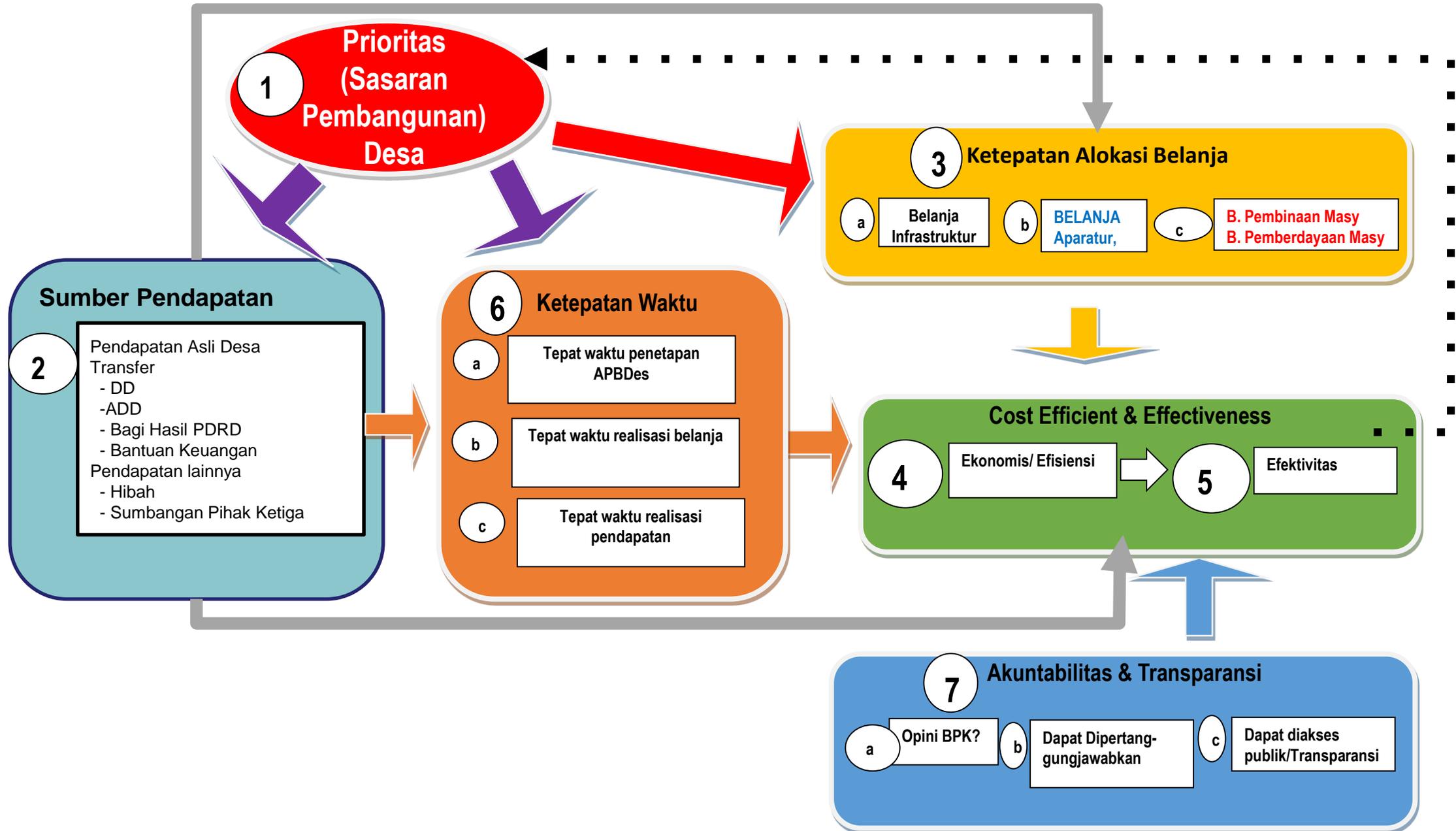


Hubungan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa



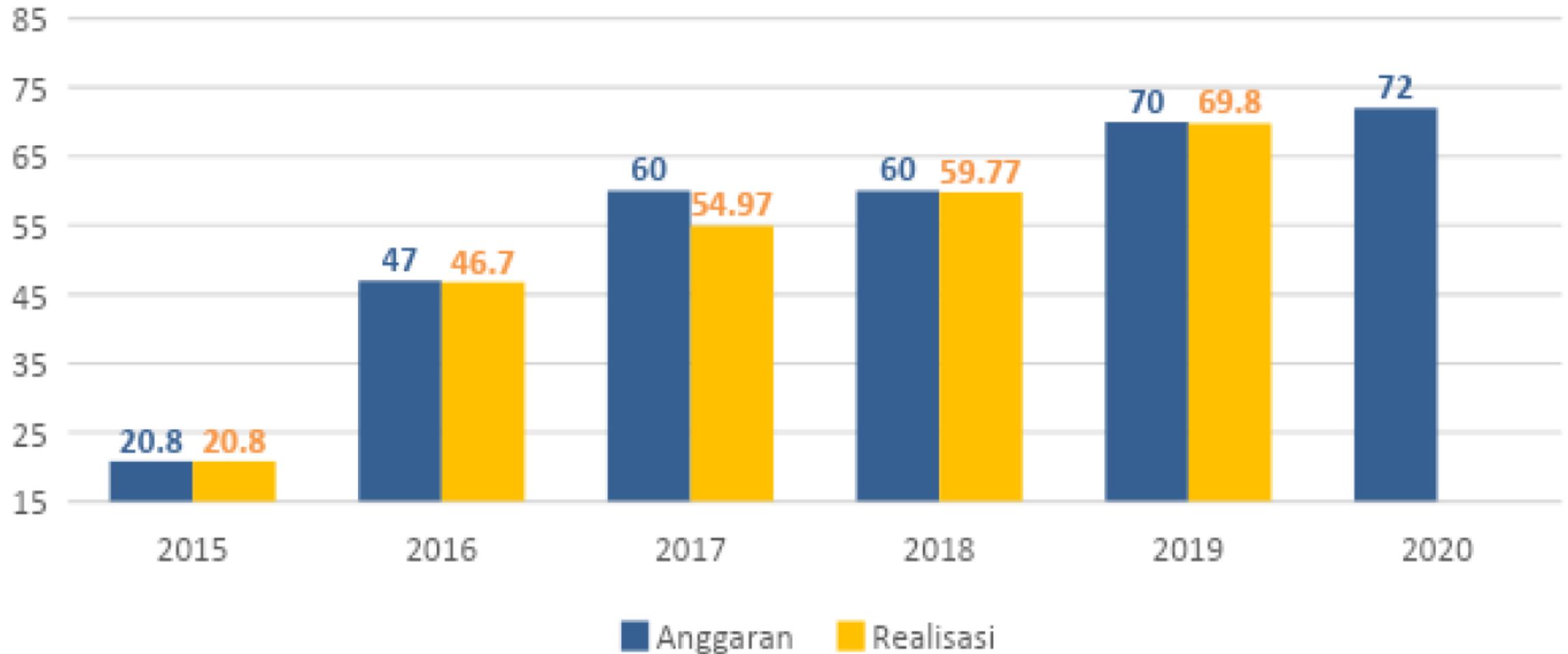
- ## Klasifikasi Belanja Desa
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - **Pelaksanaan Pembangunan Desa**
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Belanja Tak Terduga.

APBDes BERKUALITAS



Masalah Penganggaran Dana Desa (trilyun Rp)

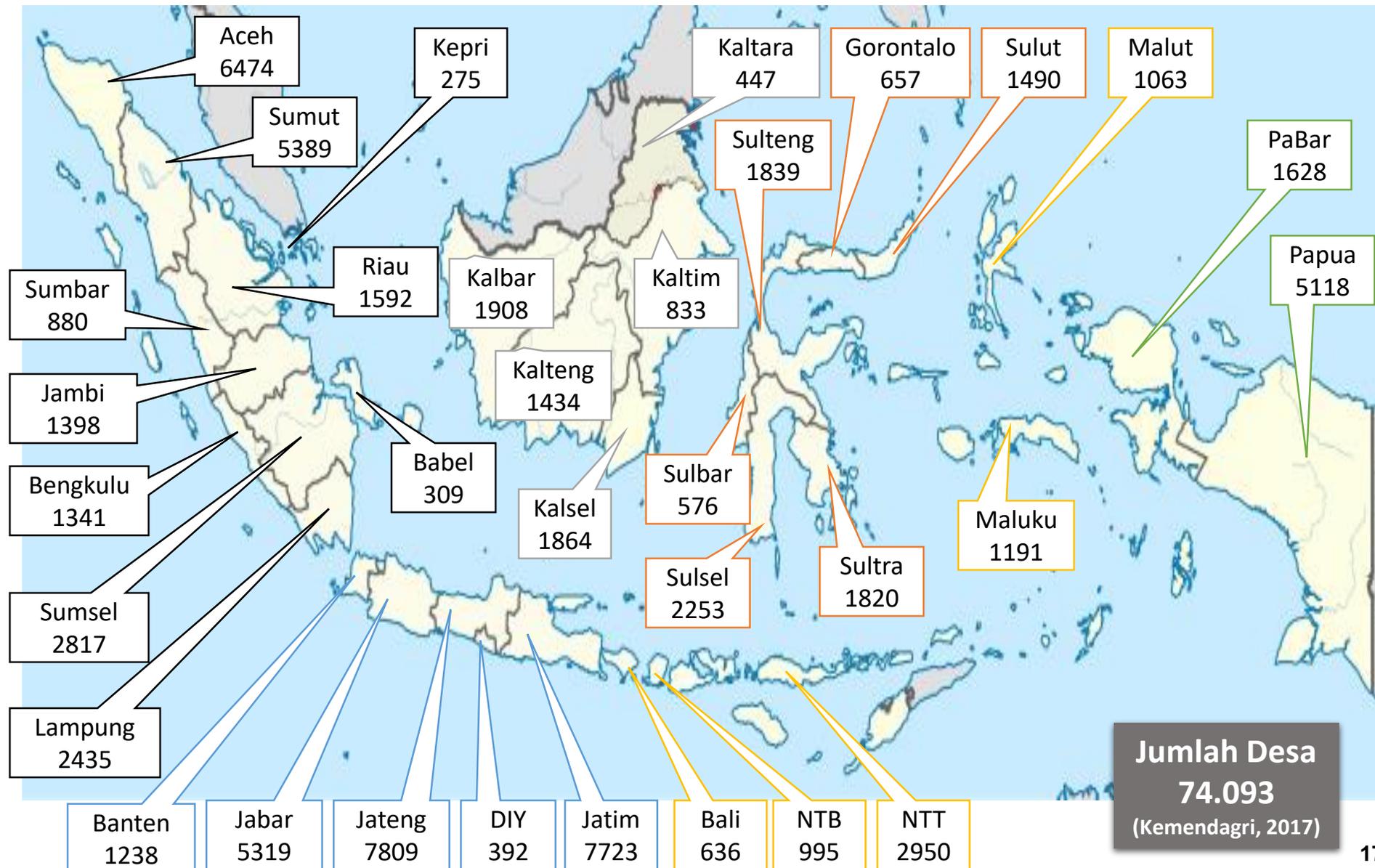
Gambar 1.1. Peningkatan Anggaran Dana Desa 2015--2020



Sumber: www.kemenkeu.go.id/dataapbn



Peta Sebaran Desa Per Provinsi

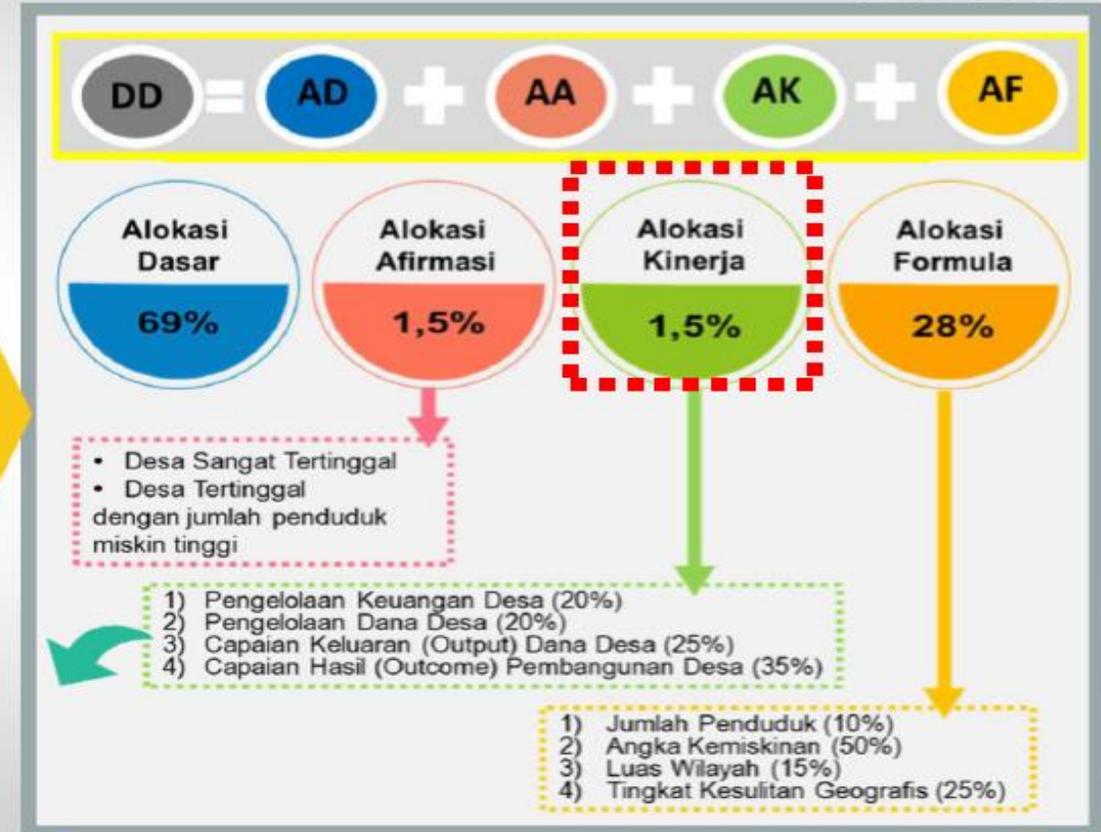
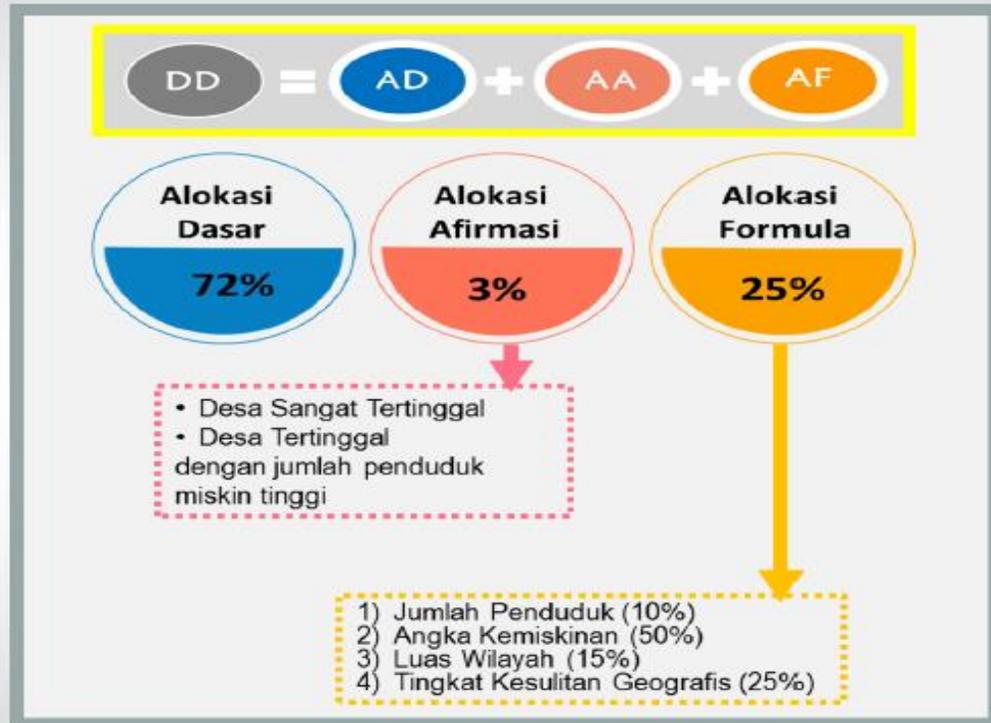


FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA (DD)

ALOKASI KINERJA BAGI DESA YANG BERKINERJA TERBAIK

Rata-Rata per Desa : Rp933,92 Juta **2019**

Rata-Rata per Desa: Rp960,59 juta **2020**



- Formula cenderung semakin kompleks, mengakomodasi berbagai tujuan yang mungkin trade-off satu sama lain

- Tujuan Alokasi Kinerja:**
1. Mendorong peningkatan kinerja PADes;
 2. Mendorong kinerja pengelolaan Dana Desa;
 3. Mendorong kinerja pengentasan kemiskinan di Desa;
 4. Mendorong kinerja peningkatan status Desa.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan : Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa

Pertumbuhan ekonomi : Proses peningkatan produksi barang & jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat → output (Real GDP / GNP)

Pertumbuhan merupakan syarat perlu bagi pembangunan

Pembangunan ekonomi → arti lebih luas & mencakup perubahan pd tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu harus ada perubahan pd komposisi produksi, perubahan pd pola alokasi SD produksi diantara sektor2 ekonomi, perubahan pd pola distribusi kekayaan & pendapatan, perubahan pd pola kerangka kelembagaan dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan → Proses transformasi → perubahan struktural

Pembangunan Ekonomi

Perkembangan ekonomi → Evolusi ekonomi yang terjadi pada negara Eropa Barat & Amerika Serikat → Sudah mempunyai struktur ekonomi → Pertumbuhan sektor industri → (Mazhab Klasik) → Dinamika Perkembangan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi → Permasalahan ekonomi Negara Berkembang (NSB), Wilayah & Desa

PEMBANGUNAN EKONOMI : suatu proses multidimensional yg mencakup tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan, pemberantasan kemiskinan dan perubahan struktur ekonomi, sikap hidup & kelembagaan

Ilmu Ekonomi Pembangunan

ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN :

Mengkombinasikan berbagai konsep & teori dari analisis IE tradisional dgn model2 baru dan pendekatan yg lebih multidisipliner, tajam, kajian sejarah & pengalaman pembangunan kontemporer (Asia, Afrika, Amerika Latin)

TUJUAN IEP → Lebih memahami perekonomian NSB (Wilayah & Desa) guna memudahkan upaya perbaikan standar hidup bagi $\frac{3}{4}$ penghuni dunia.

»

KERANGKA ANALISIS

Ilmu Ekonomi & Sistem Ekonomi : dianalisis dalam konteks sistem sosial (hub saling terkait antara faktor ekonomi dan non ekonomi) secara keseluruhan dlm satu negara & lingkungan global.

Faktor ekonomi : SDM, SDA, Teknologi, Sistem pasar, sistem perekonomian

Faktor Non Ekonomi : Sistem hukum, politik, budaya, agama, pemerintah, pendidikan, kesehatan, struktur administrasi, birokrasi
(*Values, attitudes & institutions*)

TIGA NILAI INTI PEMBANGUNAN :

- ❖ Kecukupan (***sustenance***) → Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan).
- ❖ Jatidiri (***self-esteem***) → Menjadi manusia seutuhnya → dorongan dari diri sendiri untuk maju / pantas mengejar sesuatu.
- ❖ Kebebasan dari sikap menghamba (**memilih**)

Tiga Tujuan Inti Pembangunan :

1. Peningkatan **ketersediaan** dan perbaikan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup.
2. **Perbaikan standar hidup** (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan)
3. Perluasan **pilihan²** ekonomi dan sosial bagi setiap individu & negara/wilayah